

National Conference On Economic Education  
Agustus 2016

ISBN: 978-602-17225-5-8

## LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK SEBAGAI ALTERNATIF PENDORONG KEGIATAN EKONOMI PEREMPUAN DI PEDESAAN DI JAWA TIMUR

Norida Canda Sakti<sup>1)</sup>, F. Danardana Murwani<sup>2)</sup>, Ery Tri Djatmika  
R.W.W<sup>3)</sup>, Hari Wahyono<sup>4)</sup>

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang, & Universitas Negeri  
Surabaya

email: noridacs@yahoo.com

<sup>2</sup> Universitas Negeri Malang

<sup>3</sup> Universitas Negeri Malang

<sup>4</sup> Universitas Negeri Malang

### Abstrak

*Kemiskinan menggambarkan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan mencerminkan kegagalan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya agar dapat menjalani kehidupan secara bermartabat. Kemiskinan seseorang sangat terkait dengan tingkat pendapatan, pendidikan, pengangguran, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, lingkungan, dan gender. Dengan keterbatasan tersebut, perempuan yang bergerak di bidang usaha kecil sangat sulit untuk mengakses modal guna mengembangkan usahanya. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan dan memperluas jaringan usaha dan akses permodalan melalui pengembangan dan penguatan lembaga keuangan.. Lembaga keuangan non bank (LKNB) yang dapat memberikan permodalan dengan cepat dan sudah dikenal di masyarakat pedesaan khususnya perempuan adalah pegadaian dan koperasi simpan pinjam. Peran serta pemerintah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan yang lain diperlukan dalam mengembangkan dan membina manajemen lembaga keuangan non bank agar mampu memberikan modal usaha bagi perempuan dalam mengembangkan usahanya, sehingga mampu bangkit dalam memperbaiki nasibnya keluar dari lingkaran kemiskinan.*

**Kata kunci:** lembaga keuangan non bank, perempuan, kemiskinan

Keberhasilan pembangunan mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Hal ini terkait dengan hajat hidup dan kewajiban pemerintah untuk membebaskan warga negaranya dari kemiskinan. Kemiskinan menggambarkan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk itu, kebutuhan itu tidak hanya terkait dengan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup

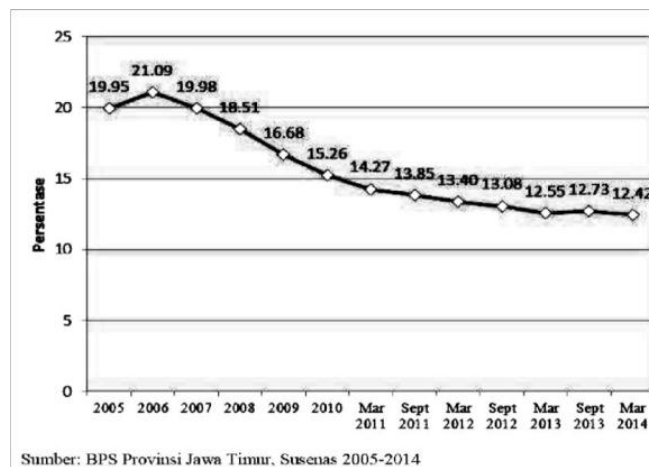
kebutuhan sosial, politik, emosional, maupun spiritual.

Kemiskinan seseorang sangat terkait dengan tingkat pendapatan, pendidikan, pengangguran, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, lingkungan, dan gender. Keterbatasan akses tersebut menyebabkan ia berpeluang menjadi pengangguran dan karena itu peluangnya untuk hidup sejahtera pun semakin kecil. Akibatnya, masyarakat miskin memiliki peluang terbatas untuk

berusaha dalam upaya peningkatan pendapatannya karena berbagai hambatan seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), akses permodalan, informasi, dan teknologi.

Pembangunan di Jawa Timur berhasil mengurangi jumlah penduduk

miskin. Grafik 1 berikut ini menginformasikan tentang perkembangan penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2014.

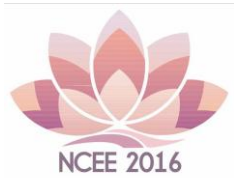


Grafik 1.  
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur 2005-2014

Berdasarkan grafik setelah tahun 2006 Provinsi Jawa Timur menunjukkan keberhasilannya dalam menurunkan angka kemiskinan. Keberhasilan terbesar dalam periode itu terjadi pada tahun 2008-2009; angka kemiskinan di Jawa Timur berhasil turun dari 18,51 % menjadi 16,68 %. Keberhasilan kedua yang paling cemerlang dalam menurunkan angka kemiskinan terjadi pada periode sebelumnya (2006-2007) yang berhasil menurunkan persentase kemiskinan sebesar 1,11 % dari 21,09 % menjadi 19,98 %. Setelah itu

keberhasilan upaya menurunkan kemiskinan relatif konstan. Pada bulan Maret 2011 Jawa Timur memiliki penduduk miskin sebesar 14,27 %; jumlah ini turun sebesar 1,19 % pada bulan September 2012 (13,08 %). Persentase ini terus berkurang sehingga jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2014 sebesar 12,42 %. Karena itu berbagai upaya percepatan penurunan kemiskinan sangat diperlukan.

Berdasarkan gender, angka kemiskinan perempuan lebih besar daripada laki-laki. Menurut data PBB,



sepertiga dari penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan, dan 70% dari angka kemiskinan tersebut diisi oleh perempuan (Jurnal Perempuan, 2005). Berdasarkan data Susenas 2013, terdapat 17,53 % rumah tangga di perkotaan dan 17,77 % rumah tangga di perdesaan yang dikepalai oleh perempuan; atau terdapat 17,66% rumah tangga dikepalai oleh perempuan. Pada tahun 2014, dari 1.230.042 rumah tangga yang ada, sebanyak 12,4 % atau 152.343 terdiri atas Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP), yang berpotensi lebih besar menjadi rumah tangga yang miskin. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, bahwa program unggulan yang dicanangkan dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur adalah program penanggulangan feminisasi kemiskinan (Radar Jogja 26 Maret 2014).

Terkait dengan pembiayaan, Pemerintah Provinsi Jawa-Timur telah melakukan beberapa hal untuk menyediakan akses pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM, antara lain dengan mendirikan PT Jamkrida, Bank UMKM, dan PT Bank Jatim sebagai Apex Bank antara BPR-BPR di Jawa-Timur dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) serta Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan KSP-KJKS sendiri sebagai salah satu Lembaga

Keuangan Non-Bank yang bergerak dalam pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil, yang memiliki peranan strategis dalam menyediakan akses layanan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan anggotanya.

Pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan *pilot project* Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di 10 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kediri, Ngawi, Jember, Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, Tulungagung, Pamekasan, dan Bojonegoro. Berdasarkan data tersebut, selain empat kabupaten yang telah ditentukan (Madiun, Nganjuk, Jombang, dan Mojokerto), penelitian ini juga dirancang untuk dilaksanakan di Probolinggo dan Pasuruan, sebagai daerah yang dirancang sebagai wilayah *pilot project* Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan.

Penelitian ini dilakukan dengan *setting* perdesaan. Program-program lembaga keuangan non-bank ini tidak hanya terkait dengan program-program yang dilakukan pemerintah, tetapi juga yang dilakukan oleh pihak swasta. Melalui kajian terhadap program-program pengentasan kemiskinan ini diharapkan dapat ditemukan model lembaga keuangan non bank yang efektif dalam melakukan



penanggulangan kemiskinan, khususnya pada kelompok perempuan.

Permasalahan penelitian ini dirumuskan: bagaimanakah model pengembangan program-program penanggulangan kemiskinan melalui lembaga keuangan non-bank yang diharapkan dapat menjadi pendukung usaha ekonomi perempuan di perdesaan?

Tujuan penelitian ini adalah merekomendasikan ide-ide pengembangan program-program penanggulangan kemiskinan melalui lembaga keuangan non-bank yang diharapkan dapat menjadi pendukung usaha ekonomi perempuan di perdesaan.

Hasil yang diharapkan melalui penelitian ini adalah: terumuskannya model program-program penanggulangan kemiskinan melalui lembaga keuangan non-bank yang diharapkan dapat menjadi pendukung usaha ekonomi perempuan di perdesaan.

Ruang lingkup penelitian adalah: menganalisis model ideal pengembangan program-program penanggulangan kemiskinan dalam upaya mendukung peran dan partisipasi perempuan pada kegiatan ekonomi di lingkup perdesaan.

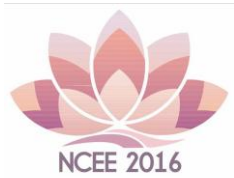
#### **A. Pengertian, Indikator, dan Usaha-usaha Penanggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan adalah kondisi deprivensi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti

pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar. Kondisi deprivasi ini tidak dirasakan secara sama oleh setiap orang atau keluarga dengan wilayah berbeda. Oleh karena itu, Usman (1998: 13) lebih merumuskan sebagai kemiskinan relatif karena ukurannya bersifat relatif pula. Ukurannya bergantung pada tempat dan ruang waktu tertentu. Sementara itu, Selo Soemardjan (1984) lebih mencermati bahwa kemiskinan itu terjadi sebagai akibat struktur sosial yang mengurangi akses dalam memperoleh sumber-sumber pendapatan. Kemiskinan struktural ini diamini oleh Dorodjatun Kuntjoro Jakti (1994) dengan menawarkan solusi untuk memberikan peluang golongan miskin untuk berpartisipasi dalam merumuskan kepentingannya.

John Friedman (dalam Suyanto, 2013:2) mencermati kemiskinan sebagai produk ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada): modal produktif atas aset, sumber keuangan, dan organisasi sosial dan politik, jaringan sosial, dan informasi yang berguna untuk kehidupan.

Pengamatan yang lebih jeli diungkapkan oleh Djojohadikusumo (1995) dan Kartasmita (1996:235-236). Di Indonesia, menurut kedua ahli



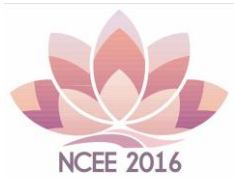
tersebut, ada empat pola kemiskinan. Pola pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Kemiskinan seperti ini misalnya terjadi di daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya, atau daerahnya yang terisolasi. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan terjadi karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Singkat kata, faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah (1) natural, (2) kultural, dan (3) struktural (Kartasmita, 1997:235-236; Baswir, 1997:23; Suyanto, 2013:8-9).

Sementara indikator kemiskinan yang dikemukakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yaitu keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, jika memenuhi indikator-indikator berikut: 1) anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih, 2) anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dipakai di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian, 3) rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai dan dinding yang

baik, 4) bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan, 5) bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi, 6) semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Selanjutnya Adisasmita (2006) menjelaskan tentang indikator kemiskinan pada masyarakat perdesaan yaitu jika salah satu indikator berikut ini terpenuhi: 1) kurang kesempatan memperoleh pendidikan, 2) memiliki lahan dan modal pertanian yang terbatas, 3) tidak adanya kesempatan menikmati investasi di sektor pertanian, 4) tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar (pangan, papan, perumahan), 5) berurbanisasi ke kota, 6) menggunakan cara-cara pertanian tradisional, 7) kurangnya produktivitas usaha, 8) tidak adanya tabungan, 9) kesehatan yang kurang terjamin, 10) tidak memiliki asuransi dan jaminan sosial, 11) terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan desa, 12) tidak memiliki akses untuk memperoleh air bersih, 13) tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penganggulangan kemiskinan, dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan bersasaran (*targeted program*). Program-program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan sasaran langsung kepada mereka



yang tergolong miskin dan dekat miskin. Program penanggulangan kemiskinan kepada mereka yang membutuhkan diharapkan akan jauh lebih efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Klaster 1: Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Rumah Tangga atau Keluarga. Program tersebut antara lain: Program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai tanpa syarat, bantuan langsung dalam bentuk misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin.

Klaster 2: Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Komunitas. Contoh program ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Karakteristik programnya adalah (1) menggunakan pendekatan partisipatif, (2) penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, (3) pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, dan (4) perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu jenis program ini adalah PNPM.

Klaster 3: Program Penanggulangan Kemiskinan

Bersasaran Usaha Mikro dan Kecil. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Karakteristiknya adalah (1) Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, (2) Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, dan terakhir (3) Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha. Jenis programnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Klaster 4: Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat. Program ini dimaksudkan untuk: (1) membantu melindungi tingkat dasar dari konsumsi, (2) memfasilitasi investasi manusia dan aset produktif lain, (3) memperkuat mereka yang berada dalam kemiskinan. Jenis programnya adalah bantuan sosial dan jaminan sosial, seperti: rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum murah, program air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, serta peningkatan kehidupan nelayan, dan program peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.



Gambar 2.1 Ilustrasi Kebijakan 4 Kluster Penanggulangan Kemiskinan

## B. Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga Keuangan Non Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro ini umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM berfungsi membantu masyarakat miskin dalam melaksanakan usaha ekonomis produktif. LKM juga menjadi sarana menanggulangi kemiskinan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non

bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan credit union. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya (Waloejo 2005).

Dasar hukum pendirian lembaga keuangan bukan bank yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792/MK/IV/12/70 tanggal 7 Desember 1970 kemudian diubah dan ditambah dengan keputusan Menteri Keuangan. Tujuan pendirian Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah: (1) untuk mendorong perkembangan pasar modal, dan (2) membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.

Tabel 2.4  
Perbedaan Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Perbankan

No	Lembaga Keuangan Non Bank	Lembaga Perbankan
1.	Dalam pelaksanaan kegiatannya tidak memungut dana dari	Dana bersumber dari masyarakat.
2.	Menyediakan dana atau barang	Hanya menyediakan modal
3.	Kadang kala tidak	Selalu disertai dengan jaminan.
4.	Biasanya memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.	Memberikan tingkat suku bunga yang lebih rendah.
5.	Tidak dapat menciptakan uang giral.	Dapat menciptakan uang giral.
6.	Pengaturan, perizinan, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh departemen keuangan.	Pengaturan, perizinan, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia (UU No. 10 Tahun 1998), selanjutnya dialihkan kepada lembaga pengawas jasa keuangan sesuai UU No. 23 Tahun 1999.

Lembaga Keuangan Non Bank mempunyai peranan yang lebih penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Non Bank adalah sebagai berikut:

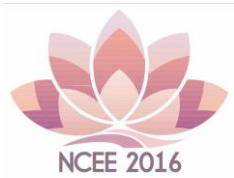
(a) perusahaan asuransi, (b) perusahaan dana pensiun (Taspen), (c) Koperasi Simpan Pinjam (d) pasar modal, (e) modal ventura, (f)

Anjak Piutang, serta (g) sewa guna usaha atau leasing.

### C. FEMINISASI KEMISKINAN

Konsep feminisasi kemiskinan menggambarkan “pembakuan pola” kemiskinan bagi perempuan. Konsep ini dengan jelas menggambarkan ketidakadilan dalam soal jumlah perempuan di antara orang miskin dibandingkan dengan laki-laki (Kantor Perburuhan Internasional, 2004:1). Pada masyarakat yang patriarkhi, yaitu konstruksi



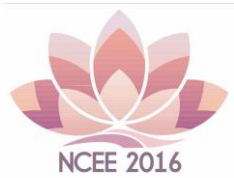


masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih utama daripada perempuan, adalah hal yang biasa untuk menempatkan perempuan pada posisi domestik dan bukan publik, pada fungsi reproduktif dan bukan produktif, sehingga akan tampak wajar saja jika perempuan tak berpenghasilan lebih baik atau bahkan tak berpenghasilan sama sekali; akan menjadi hal yang biasa bagi perempuan untuk berada dalam kemiskinan daripada laki-laki.

Salah satu hambatan struktural adalah adanya relasi gender (*gender relation*) yang tidak adil dan setara sebagai akibat dari budaya yang sangat paternalistik. Budaya patriarki seperti ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan dan sistem distribusi sumber daya yang bias gender. Pembakuan peran gender di masyarakat telah menyebabkan ketidakadilan gender bagi perempuan (Wiludjeng, Habsjah,

dan Wibawa, 2005:50). Kultur yang demikian ini akhirnya akan bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, eksploitasi maupun kekerasan terhadap perempuan.

Sebagian besar perempuan Indonesia adalah miskin karena tidak hanya secara ekonomi mereka terbelakang tetapi juga dalam hal keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan, politik, kesehatan dan lain-lain, partisipasi mereka pun kurang diberi tempat. Hal ini yang pada gilirannya memunculkan feminisasi kemiskinan. Miskin pendidikan akan berpengaruh terhadap kemiskinan pada aspek yang lain, seperti pada akses terhadap pekerjaan, politik dan pengambilan keputusan. Perempuan yang tidak mempunyai sumberdaya pribadi berupa pendidikan dengan sendirinya akan sangat sulit untuk mengakses pekerjaan terutama di sektor formal yang relatif berupah tinggi. Wilayah pekerjaan mereka biasanya terbatas pada sektor informal yang berupah rendah seperti buruh kasar atau pembantu rumah tangga.



## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan yang utama dan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan tambahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kebijakan. Adapun kebijakan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengentasan kemiskinan bagi perempuan melalui LKNB.

Secara teritori populasi penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur, namun dengan beberapa pertimbangan dibatasi pada enam kabupaten sebagai sampel wilayah penelitian yaitu Kabupaten Madiun, Nganjuk, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, dan Probolinggo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu selama enam bulan, berlaku terhitung mulai bulan April sampai dengan September 2015.

Subjek dalam penelitian ini diambil secara purposif berdasarkan kriteria bahwa ia adalah penerima program hibah LKNB paling tidak satu tahun sebelumnya. Subjek dalam penelitian ini diambil 25

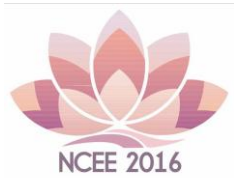
orang per kabupaten kota lokasi penelitian.

Data dikumpulkan dengan beberapa teknik yaitu angket, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dengan menggunakan prosentase.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah disampaikan dalam metode penelitian, setiap kabupaten diambil 25 perempuan yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Ke-25 perempuan pengusaha itu berasal dari wilayah yang berbeda, yaitu desa yang dekat dengan pusat pemerintahan dan desa yang jauh. Data menunjukkan bahwa: 1) (45%) perempuan penerima bantuan LKNB adalah berusia di antara 40 s.d. 59 tahun; 2) 67,3 % berpendidikan tamat SMP atau di bawahnya; 3) 90% berstatus menikah; 4) 73.5% memperoleh pendapatan kurang dari Rp 500.000,- dan pengeluaran kurang dari Rp. 500.000,- perbulan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa setiap kategori LKNB ini memiliki penciri dan keunggulan yang berbeda satu sama



dengan yang lain. PT. Pegadaian yang memberikan pinjaman dengan agunan barang lebih memberikan ruang bagi keluarga miskin pada saat-saat tertentu. Besar pinjaman ditentukan oleh nilai barang yang diagunkan. Apabila tidak bisa membayar setelah jangka waktu tertentu, maka agunan tersebut akan dilelang.

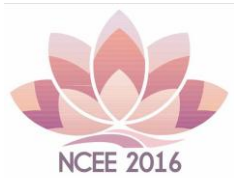
Hal itu berbeda dengan koperasi simpan pinjam. Keharusan menjadi anggota sebagai satu bagian yang harus dilalui terlebih dahulu. Besaran pinjaman bergantung pada modalnya dan peminat dari pinjaman tersebut. Syarat peminjaman di koperasi jauh lebih mudah, hanya berbekal KTP dan KSK saja, tanpa agunan.

Mekanisme dan pola rekrutmen calon penerima bantuan LKNB sudah ditentukan dengan jelas. Penelitian yang dilakukan di enam kabupaten di Jawa Timur yaitu Mojokerto, Jombang, Madiun, Nganjuk, Probolinggo, dan Pasuruan, mengungkapkan bahwa program LKNB yang ditemui di lapangan adalah LKNB binaan atau program kerja dari satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) terkait misalnya Koperindag atau Dinas Koperasi dan

Bapemas. Sebagian besar LKNB yang ditemui di lapangan adalah Koperasi Wanita (Kopwan). Nama lembaga ini tidak selalu sama di setiap daerah. LKNB Unit Pelaksana Keuangan (UPK) yang merupakan tangan dari PNPM Mandiri yang dinaungi oleh Bapemas, serta ada di daerah tertentu yang LKNB-nya berbentuk paguyuban.

Beberapa hal yang juga dipertimbangkan dalam menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan yang wajib dilakukan oleh lembaga ekonomi desa kepada calon penerima dana dari LKNB adalah: 1) Kejelasan bentuk usaha, 2) Kelompok usaha yang menaungi, 3) Administrasi bentuk usaha yang dijalankan

Beberapa kendala yang terjadi dalam upaya pemanfaatan dana bantuan di antaranya: 1) terbatasnya wewenang Bapemas dalam menindak pelaku penyelewengan, 2) lemahnya aturan dari pemerintah terhadap penyalahgunaan dana, 3) rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengembalikan dana yang dipinjam, 4) banyaknya kredit macet, dan 5) adanya koperasi yang abal-abal. Model LKNB sebenarnya jauh

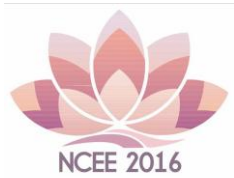


lebih menyetuh dari pada PT Pegadaian dan Lembaga Keuangan Bank. Ikatan antara koperasi maupun LKM dan pengguna bukan merupakan ikatan yang sesaat, tetapi dibangun dari hubungan yang terus-menerus. Pengurus sangat mengenal anggotanya, begitu pula para anggotanya. Pengurus dipilih oleh para anggotanya melalui rapat anggota. Kepala desa memilih orang-orang terdekat yang kiranya dapat menyukseskan program pembangunan tersebut. Peminjamnya sering dipilih dari orang yang telah dipercaya atau memiliki kredibilitas untuk bisa mengembalikan. LKNB memberikan kemudahan prosedur dan persyaratan untuk memperoleh bantuan dana dalam pengembangan usaha menjadi bagian yang sangat baik oleh responden. Hal ini tentu memudahkan mereka yang berasal dari kelompok marginal yang ingin berusaha untuk keluar dari masalah kemiskinannya. Inilah keunggulan LKNB.

#### **IV. KESIMPULAN**

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan non bank (LKNB) merupakan lembaga pemberi pinjaman yang berperan penting bagi masyarakat miskin dalam menemukan jalan keluar bagi kebutuhan modal untuk melakukan aktivitas usaha. Kemudahan ini karena bentuk pinjaman ini tidak menuntut agunan, proses dan syaratnya mudah (KTP dan KSK, serta rencana usaha), sementara pembayaran angsuran dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan keberhasilan usaha peminjam dalam waktu yang telah ditentukan.
2. Responden memberikan respon yang baik terhadap pengembangan model program LKNB. Berbagai usaha produktif dapat dijalankan oleh ibu-ibu pelaku usaha agar bias keluar dari kemiskinan yang dialami. Berbagai usaha dipilih oleh para penerima dana hibah ini baik yang berupa jasa maupun produksi barang.
3. Beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pengembangan model LKBN antara lain: 1)



terbatasnya wewenang Bapemas dalam menindak pelaku penyelewengan, 2) lemahnya aturan dari pemerintah terhadap penyalahgunaan dana, 3) rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengembalikan dana yang dipinjam, 4) banyaknya kredit macet, dan 5) adanya koperasi yang abal-abal.

## V. REKOMENDASI

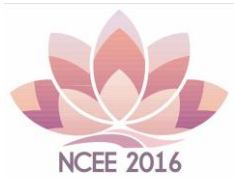
1. Ada baiknya mengembangkan hubungan sinergis antara masyarakat, LKCNB, Perbankan dan Pemerintah, perguruan tinggi atau pihak yang lain;
2. Perlu pendampingan program pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dari awal. Peranan pemerintah atau pihak-pihak lain dalam melakukan pemetaan potensi wilayah dan resiko sosial atas usaha yang akan dikembangkan;
3. Pendampingan tidak saja berhenti pada saat awal, tetapi juga dilanjutkan pada saat menerima dan mengimplementasi bantuan. Hal itu dapat berbentuk pelatihan

mulai dari produksi hingga pemasaran;

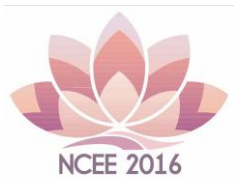
4. Perlu ada monitoring, evaluasi dan pemberian sanksi pada penyimpangan terhadap kesalahan atau penyimpangan program

## DAFTAR RUJUKAN

- Antara, “*Bappenas: Program pengentasan kemiskinan 2014 dimajukan 2013.*” Selasa, 30 April 2013. *Pewarta: Dewanto Samodro*
- Barrientos, Armando. 2010. *Social Protection and Poverty. Social Policy and Development. Programme Paper Number No. 42.* E-paper. United Nations Research Institute for Social Development.
- Baswir, Revrison, 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Benjamin, 2010. “Strategi Perempuan Miskin dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup” dalam *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15, No. 2. Halaman 96-109



- Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XVI, 2 Januari 2014.
- Cahyono, I. 2005. "Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan". *Jurnal Perempuan* No.42. Hal.7-17. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Chambers, Robert.1987. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta:LP3ES. Gema Desa, September 2014.
- Idris, Indra, 2006. "Pengembangan Lembaga Keuangan Non-Bank untuk Pemberdayaan UKM." Dalam *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Nomor 2 Tahun I – 2006. Halaman 99-105.
- Keppres nomor 61 Tahun 1988 tentang *Lembaga Pembiayaan*.
- Keppres nomor 792/MK/IV/12/70 tentang *Lembaga Keuangan Bukan Bank*
- Koentjoro Jakti, Dorodjatoen, 1994. *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhadjir, 2005. *Negara dan Perempuan*. Yogyakarta: CV. Adipura.
- Permendagri RI Nomor 7 tahun 2007 tentang *Kader Pemberdayaan Masyarakat*.
- Quswini, HM (2013) *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitulmaal Wattanwil*. Jurnal
- Rachmat Hendrayana dan Sjahrul Bustaman, 2013. *Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Jurnal
- Ravallion, Martin, 1998. *Poverty Lines in Theory and Practice, Living Standards Measurement*
- Soemardjan, Selo (1984) *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia .
- Soetrisno, Lukman, 1997. *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Warta Metropolis Jatim, 7 Desember 2013. "Peranan Bank/Lembaga Keuangan, Koperasi, dan UMKM dalam memperkuat



*National Conference On Economic Education  
Agustus 2016*

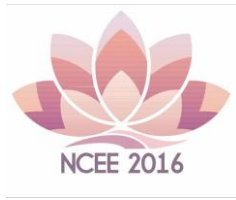
**ISBN: 978-602-17225-5-8**

struktur perekonomian

Jawa-Timur.”

<http://wartametropolis.com/2>

013/12/peranan-bank



*National Conference On Economic Education  
Agustus 2016*

**ISBN: 978-602-17225-5-8**